



**2024**

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**

## Kata Pengantar

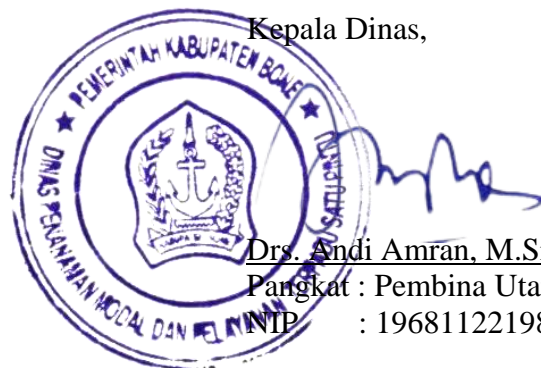
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan amanat perundang-undangan yang berlaku, sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja Perubahan ini, selain sebagai pembuktian akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone kepada masyarakat, juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi daerah yang ditetapkan pada awal masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur, akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik, sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Tim Penyusun dan Pengarah Rencana Kerja Perubahan yang telah mengarahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunnya Renja Perubahan yang diharapkan sesuai dengan cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Semoga referensi Renja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Watampone, 29 Juli 2024

Kepala Dinas,



Drs. Andi Amran, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196811221989081001

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan Daerah pada umumnya. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone 2024 :

- a. Berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD

Perubahan, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD Perubahan;

- d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif perubahan Perangkat Daerah;
- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun  $n$  dan tahun  $n+1$ .

Keterkaitan Renja Perubahan Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD Perubahan dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena di dalam Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD Perubahan. Renja Perubahan Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra Perangkat Daerah, dan RPD, bagi RKA Perubahan Perangkat Daerah, KUPA, PPAS, dan RAPBD Perubahan.

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis (Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone beserta sasaran satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dan diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2024 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021;
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
21. Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 12 Tahun 2024 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 61 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024-2026.
24. **Perbup Renja Perubahan**

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam memperbaiki perencanaan dan merumuskan rencana program dan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone setelah penetapan perubahan

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan kegiatan pelayanan perizinan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu setelah perubahan;
2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pelayanan perizinan yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

**1.4. Sistematika Penyusunan**

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

**1.1 Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, keterkaitan antara Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dokumen RKPD Perubahan, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana Kerja Perubahan Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Perubahan.

**1.2 Landasan Hukum**

Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**1.3 Maksud dan Tujuan**

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**1.4 Sistematika Penulisan**

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta susunan garis besar isi dokumen.

**BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU**

## **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.**

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun – tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang bersangkutan.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut.

## **2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah**

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.



Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolak ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

### **2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

**Berisikan uraian mengenai :**

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (sustainable Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD**

**Berisikan uraian mengenai :**

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan – temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### **2.5 Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun

dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah kabupaten dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten.

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

### **Bab III TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

#### **3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

#### **3.3 Program dan Kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel rencana program dan kegiatan.

### **Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

### **Bab V PENUTUP**

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut

4. Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TAHUN LALU**

---

#### **2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone selama tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

##### **A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

##### **B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.**

##### **Evaluasi Program Tahun 2022**

Anggaran Tahun 2022 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp 6.641.414.900 dan APBD (perubahan) sebesar Rp 7.321.669.300 terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 94,67% dan capaian kinerja keuangan sebesar 97%. Dengan rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.1.1**  
**Realisasi Fisik dan Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022**

PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME /OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET		REALISASI		PRESENTASE REALISASI (%)	
			KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)	KINERJA	KEUANGAN (Rp)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	Persen	100	Rp 5,892,264,538	100	Rp 5,799,433,923	100%	98%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (persen)	Persen	100	Rp 29,917,250	100	Rp 29,467,250	100%	98%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	Dokumen	2	Rp 29,917,250	3	Rp 29,467,250	150%	98%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu (persen)	Persen	100	Rp 3,738,997,868	100	Rp 3,680,805,735	100%	98%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi ASN (laporan)	laporan	14	Rp 3,738,997,868	14	Rp 3,680,805,735	100%	98%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Persen	100	Rp 58,575,000	100	Rp 53,450,000	100%	91%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas (laporan)	laporan	1	Rp 36,450,000	1	Rp 36,450,000	100%	100%
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti (laporan)	laporan	1	Rp 22,125,000	1	Rp 17,000,000	100%	77%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (persen)	laporan	100	763,099,680	100	754,316,089	100%	99%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor (laporan)	Persen	12	Rp 84,026,400	100	Rp 83,676,400	833%	100%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	laporan	4	Rp 4,683,280	12	Rp 4,683,280	300%	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	laporan	12	Rp 275,351,000	4	Rp 275,351,000	33%	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (laporan)	laporan	12	Rp 39,915,000	12	Rp 39,915,000	100%	100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pembayaran Media Bahan Bacaan	laporan	12	Rp 39,840,000	12	Rp 37,440,000	100%	94%
	Jumlah Laporan pembayaran Media yang Menayangkan Iklan	laporan	12		12		100%	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (laporan)	Media	170	Rp 299,284,000	104	Rp 293,250,409	61%	98%
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pemeliharaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (laporan)	Media	1	Rp 20,000,000	1	Rp 20,000,000	100%	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	laporan	40	Rp 139,748,500	30	Rp 130,856,500	75%	94%
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan (laporan)	laporan	1	Rp 33,892,000	1	Rp 25,000,000	100%	74%
Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebeleur (laporan)	Persen	1	Rp 10,596,000	1	Rp 10,596,000	100%	100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (laporan)	laporan	1	Rp 95,260,500	1	Rp 95,260,500	100%	100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	Rp 747,419,200	100	Rp 736,348,309	100%	99%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel (rekening)	Rekening	24	Rp 156,840,000	24	Rp 154,096,703	100%	98%

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	laporan	3	Rp 590,579,200	3	Rp 582,251,606	100%	99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (persen)	Persen	100	Rp 414,507,040	100	Rp 414,190,040	100%	100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan (laporan)	laporan	12	Rp 133,987,640	12	Rp 133,979,040	100%	100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (laporan)	laporan	12	Rp 33,540,000	12	Rp 33,540,000	100%	100%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	laporan	1	Rp 246,979,400	1	Rp 246,671,000	100%	100%
<b>PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (persen)</b>	Persen	85	<b>Rp 623,695,000</b>	80	<b>Rp 553,079,650</b>	94%	89%
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	izin	7700	Rp 623,695,000	8095	Rp 553,079,650	105%	89%
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (laporan)	laporan	1800	Rp 330,880,000	277	Rp 279,556,000	15%	84%
	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (dokumen)	Dokumen	1		1		100%	
	Jumlah laporan izin terbit yang diarsipkan (laporan)	laporan	7700		8095		105%	
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Money penyelegaraan perizinan (dokumen)	Dokumen	1	Rp 241,500,000	1	Rp 235,966,400	100%	98%
	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (dokumen)	Dokumen	1		1		100%	
	Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (dokumen)	Dokumen	1		1		100%	
Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	laporan	5	Rp 51,315,000	5	Rp 37,557,250	100%	73%
<b>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (persen)</b>	Persen	18	<b>Rp 28,490,000</b>	782	<b>Rp 28,414,950</b>	4344%	100%
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan (persen)	Persen	100	Rp 17,605,000	100	Rp 17,530,000	100%	100%
Penetapan Kebijakan Daerah Mengena Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen PERDA/Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah (dokumen)	Dokumen	1	Rp 17,605,000	1	Rp 17,530,000	100%	100%
	Jumlah Standar OperasionalProsedur Pelaksanaan Pemberian Fasititas / Insentif Penanaman Modal (dokumen)	Dokumen	1		1		100%	
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi (persen)	Persen	100	Rp 10,885,000	100	Rp 10,884,950	100%	100%
Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan RUPM (dokumen)	Dokumen	1	Rp 4,810,000	1	Rp 4,809,950	100%	100%
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (dokumen)	Dokumen	1	Rp 6,075,000	1	Rp 6,075,000	100%	100%
<b>PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (persen)</b>	Persen	15	<b>Rp 706,882,000</b>	77	<b>Rp 699,777,800</b>	7700%	99%
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal (investor)	Investor	150	Rp 706,882,000	431	Rp 699,777,800	287%	99%
Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Laporan Seminar Bisnis, Forum, one on one meeting (laporan)	laporan	1	Rp 19,585,000	1	Rp 19,535,000	100%	100%
	Jumlah Kegiatan Penerimaan Misi Penanaman Modal	Kegiatan	1		1		100%	

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pameran yang diikuti (laporan)	laporan	4	Rp 687,297,000	6	Rp 680,242,800	150%	99%
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (persen)</b>	<b>Persen</b>	<b>50</b>	<b>Rp 355,476,000</b>	<b>50</b>	<b>Rp 310,180,400</b>	<b>100%</b>	<b>87%</b>
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase perusahaan yang menyampaikan LKPM (persen)	Persen	75	Rp 355,476,000	50	Rp 310,180,400	67%	87%
Koordinasi dan Sinkronisasi Penantautan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang dipantau (laporan)	laporan	60	Rp 59,925,000	74	Rp 33,490,000	117%	56%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (laporan)	laporan	35	Rp 220,017,000	240	Rp 209,050,400	686%	95%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi (laporan)	laporan	15	Rp 75,534,000	187	Rp 67,640,000	1247%	90%
<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase ketersediaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan (persen)</b>	<b>laporan</b>	<b>85</b>	<b>Rp 12,519,000</b>	<b>85</b>	<b>Rp 9,350,200</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	laporan	1	Rp 12,519,000	1	Rp 9,350,200	100%	75%
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola/dikembangkan/dibangun	Persen	1	Rp 12,519,000	1	Rp 9,350,200	100%	75%
<b>TOTAL</b>				<b>Rp 7.619.326.538</b>		<b>Rp. 7.400.236.924</b>		<b>97%</b>

### Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2023 dengan usulan sebesar Rp. 11.043.438.452, terurai dalam 5 program, 12 kegiatan dan 30 sub kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2022 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2023, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

### Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Sumber Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah aparatur yang ada.

### Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone namun masih ada beberapa sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan beberapa kegiatan.

## **Anggaran**

Dengan adanya refocusing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

## **Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL)**

Pada tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) yang dapat memudahkan dalam proses Pelayanan Perizinan. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam mengaplikasikan sistem tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone melalui pendidikan kader, fungsional maupun teknis dan penambahan pegawai.

Tabel 2.1.2

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2022**  
**Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone**

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (persen)	100	100	100	100	100%	100%	
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (persen)	100	100	100	100	100%	100%	
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	7	3	6	6	100%	9	
2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	3	-	-	-	0%	-	
2.18.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA perubahan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	3	-	-	-	0%	-	



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	3	-	-	-	0%	-	
2.18.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perubahan yang disusun dan ditetapkan (dokumen)	3	-	-	-	0%	-	
2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dokumen)	9	-	4	4	100%	4	
2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun dan dilaporkan (dokumen)	12	-	-	-	0%	-	
		Jumlah Dokumen Verifikasi PMPRB	3	-	-	-	0%	-	
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu (persen)	100	100	-	-	0%	100	
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Realisasi Pembayaran Gaji dan tunjangan bagi ASN (laporan)	42	14	14	14	100%	28	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	3	-	1	1	100%	1	
2.18.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	6		2	2	100%	2	
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	100	100	100	100	100%	200	
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah laporan pengadaan pakaian dinas	3	1	73	73	100%	74	
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Laporan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti (laporan)	3	1	2	1	50%	2	
2.18.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah laporan kegiatan sosialisasi Peraturan perundang undangan yang dilaksanakan (laporan)	3	1	6	1	17%	2	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Laporan kegiatan Bimbingan Tekhnis yang diikuti (laporan)	3	-	12	12	100%	12	
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (persen)	100	100	100	100	100%	200	
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan perlatan dan perlengkapan kantor (laporan)	36	12	-	-	0%	12	
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (laporan)	12	4	-	-	0%	4	
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah laporan penyediaan Bahan Logistik Kantor (laporan)	36	12	-	-	0%	12	
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah laporan penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (laporan)	36	12	-	-	0%	12	
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah laporan pembayaran Media Bahan Bacaan	36	12	13	13	100%	25	
		Jumlah Laporan pembayaran Media yang Menayangkan Iklan	36	12	2	2	100%	14	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Perjalanan Dinas (laporan)	511	82	75	75	100%	157	
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah laporan pemeliharaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik (laporan)	3	1	1	1	100%	2	
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	125	25	100	100	100%	125	
2.18.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (laporan)	2	1	4	-	0%	1	
2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah laporan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (laporan)	4	1	-	-	0%	1	
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Pengadaan Mebeleur (laporan)	3	-	20	5	25%	5	
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (laporan)	3		15	15	100%	15	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	100	100	100	100	100%	200	
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel (rekening)	72	24	36	36	100%	60	
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (laporan)	9	3	47	47	100%	50	
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (persen)	100	100	100	100	100%	200	
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan (laporan)	36	12	17	17	100%	29	
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin (laporan)	36	12	20	20	100%	32	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	1	1	1	1	100%	2	
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung Kantor dan bangunan lainnya (laporan)	1	-	-	-	0%	-	
2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (persen)	255	85	-	-	0%	85	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	23200	4.944	7.200	6.458	90%	11.402	
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah laporan Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (laporan)	5400	1.259	1.600	3.385	212%	4.644	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (dokumen)	3	1	1	-	0%	1	
		Jumlah laporan izin terbit yang diarsipkan (laporan)	23200	4.944	7.200	6.458	90%	11.402	
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dokumen)	3	1	1	-	0%	1	
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (dokumen)	3	-	4	4	100%	4	
		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (dokumen)	3	1	1	-	0%	1	
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Laporan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	17	4	1	1	100%	5	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (persen)	54	57	-	-	0%	57	
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan (persen)	1050	100	100	100	100%	200	
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Dokumen PERDA / Regulasi Pemberian Fasilitas/Insentif Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah (dokumen)	54	1	1	1	100%	2	
		Jumlah Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	100	1	1	1	100%	2	
2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Laporan hasil Evaluasi pelaksanaan Pemberian / Insentif penanaman modal (dokumen)	3		1	1	100%	1	
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi (persen)	3	100	100	100	100%	200	



KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan Evaluasi Pelaksanaan RUPM (dokumen)	100	1	1	1	100%	2	
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (dokumen)	3	1	1	1	100%	2	
2:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (persen)	3	117	-	-	0%	117	
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal (investor)	45	243	50	59	118%	302	
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Seminar bisnis, forum, one on one meeting	450	1	2	1	50%	2	
		Jumlah Kegiatan Penerimaan misi Penanaman Modal	9	-	-	-	0%	-	
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Kegiatan Pameran yang diikuti (laporan)	12	1	4	1	25%	2	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2:18:05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (persen)</b>	150	<b>10</b>			0%	10	
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal (persen)	225	<b>10</b>	-	-	0%	10	
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan Perusahaan yang dipantau (laporan)	180	50	50	50	100%	100	
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan kegiatan pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal (laporan)	110	22	-	-	0%	22	
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Laporan Perusahaan yang diawasi (laporan)	45	10	-	-	0%	10	
2:18:06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase ketersediaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinani (persen)</b>	255	<b>70</b>	-	-	0%	70	

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9= (5+7)	10 = 10/4)
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	3	1	1	-	0%	1	
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik yang dikelola/dikembangkan/dibangun	3	1	1	1	100%	2	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penggabungan antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan Bupati Bone Nomor 33 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam hal melaksanakan pelayanannya senantiasa berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur, dengan tujuan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta sebagai panduan bagi seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Izin yang dikelola oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone sejak terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang penyederhaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone adalah sebanyak 17 izin + 1 izin Penanaman Modal.

Proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara paralel/simultan dengan adanya Tim Teknis yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan perizinan yang terkoordinasi, terarah, dan tepat sasaran. Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari Unsur SKPD Teknis terkait perizinan dan juga Unsur DPMPSTSP yang bertugas antara lain :

1. Memberikan kajian teknis terhadap pemrosesan perizinan;
2. Memberikan rekomendasi disetujui / ditolak untuk diterbitkan izin.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.

Sejak Tahun 2016 proses pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan aplikasi on line melalui website ***www.bp2t\_bone.id*** dan ditahun 2017 berubah nama menjadi ***www.dpmptsp.bone.go.id*** dan sms gateway dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, pendaftaran izin secara online, perhitungan retribusi IMB, tracking dokumen serta masyarakat dapat mendownload permohonan izin.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone didasarkan pada *review* pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023.

**Tabel 2.1.3**  
**Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP			BB	BB	A	B	BB	A	
	Indeks Kepuasan Masyarakat			A	A	A	B	A	A	
	Presentase Peningkatan Investasi (persen)			15	18	21	57%	18	21	
	Nilai PMA/PMDN (Milyar)			300	350	400	278.269.682.501	350	400	
			PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1	1	1	1	1	1	
			Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas insentif penanaman modal	1	1	1	1	1	1	
			Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1	1	1	1	1	1	
			Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	1	1	2	1	1	2	
			Kegiatan pameran penanaman modal	4	4	4	4	4	4	
			Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1	1	1	1	1	1	

NO	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra			Realisasi Capaian	Proyeksi		Catatan Analisis
				2021	2022	2023		2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	1	1	1	1	1	1	
			Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	7500	7700	8000	4944	7700	8000	
			Laporan realisasi penanaman modal	300M	350M	400M	278.269.682.501	350M	400M	
			Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	25	35	50	25	35	50	
			Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN				12			
			Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan kabupaten/kota				3			

2.3 Isu – Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a. Isu Internal

1. Tugas Pokok dan Fungsi
- Inovasi-inovasi dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan melibatkan masyarakat/fasilitas untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
  - Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk pencapaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bone;
  - Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
2. Sumber Daya Aparatur
- Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan hasil kegiatan;
  - Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur.

- Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi rekrutmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

### **3. Sarana dan Prasarana**

- Mengembangkan TI dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam mendukung manajemen pengelolaan pelayanan yang lebih baik dalam menunjang peningkatan Iklim Investasi.
- Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan optimasi pemeliharaan.
- Pemeliharaan Sistem Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan berlaku.

### **4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah**

Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. Salah satu konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan daerah, sehingga Kabupaten Bone menerapkan skala prioritas untuk berbagai kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang disusun dapat disetujui penganggarnya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam menyikapi keterbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan program yang ada.

#### **b. Isu Eksternal**

##### **1). Globalisasi**

Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi, transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas, memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi melalui dunia maya (virtual).

##### **2). Peraturan Perundang-Undangan**

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan *good governance* dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata supaya

penyelenggaraan *good governance* dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

### **Permasalahan**

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

- ♦ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal;
- ♦ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum sesuai SOP.
- ♦ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;
- ♦ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;
- ♦ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan pengembangan Investasi dan Penanaman Modal;
- ♦ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan penanaman modal;
- ♦ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan penanaman modal masih belum sesuai harapan;
- ♦ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
- ♦ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat surat izin lainnya yang wajib dimiliki;
- ♦ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

### **Dampak**

Belum adanya regulasi Insentif Penanaman Modal sangat berpengaruh terhadap peningkatan Ikim Investasi sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan juga Perangkat Daerah baik vertikal maupun horizontal. Organisasi Perangkat Daerah dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencanaan.

### **Tantangan dan Peluang**



### Tantangan

1. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan transparan sebagai perwujudan *good governance*.
2. Belum adanya Data peta investasi dan perizinan yang akurat.

### Peluang

1. Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan;
2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan;
3. Adanya Sistem Informasi Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL);
4. Penyelenggaraan perizinan Satu Pintu;
5. Potensi wilayah yang memadai untuk mendatangkan investor;

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategis yang harus dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan harus segera ditindaklanjuti yaitu ;

1. Data potensi investasi yang tidak lengkap.
2. Perlu diadakan pelatihan – pelatihan bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.
3. Perlunya fungsi pengawasan langsung yang lebih baik terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat
4. Perlunya sosialisasi secara terpadu untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat tentang aturan / prosedur yang berlaku
5. Perlu ditingkatkannya sarana prasarana terutama yang mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan kedinasan secara umum
6. Area Gedung/Kantor harus luas, nyaman dan aman
7. Di tambahnya staf bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram / terencana.

Dalam menyikapi isu-isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu menempuh beberapa hal diantaranya yaitu melaksanakan pelatihan bagi aparatur dalam hal penggunaan aplikasi perizinan, melaksanakan sosialisasi peraturan perundang undangan tentang perizinan dan penanaman modal serta pembuatan RUPM dan Video Profil Potensi investasi Kabupaten Bone serta keikutsertaan dalam kegiatan Promosi investasi dalam hal ini pameran.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Perubahan

Review terhadap rancangan awal RKPD Perubahan tahun 2022 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Ketersediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Rek telepon, TV Kabel (Rekening)	36	132.792.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik		Jumlah Rek telepon, TV Kabel (Rekening)	36	132.792.000	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan (orang)	47	37.897.200	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah Tenaga/Aparat Pengelola Keuangan yang mendapat jasa adm keuangan (orang)	47	37.897.200	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia (Jenis)	20	9.023.300	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Jumlah jenis alat kebersihan yang tersedia (Jenis)	20	9.023.300	
			Jumlah Tenaga Kebersihan yang mendapat Jasa/Upah Kerja (Orang)	1	6.600.000			Jumlah Tenaga Kebersihan yang mendapat Jasa/Upah Kerja (Orang)	1	6.600.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah media bahan bacaan yang tersedia (jenis)	13	14.630.000	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah media bahan bacaan yang tersedia (jenis)	13	14.630.000	
			Jumlah media yang menayangkan iklan (Jenis)	2	26.400.000			Jumlah media yang menayangkan iklan (Jenis)	2	26.400.000	
	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah		Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi (kali)	75	325.000.000	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah Dan Luar Daerah		Jumlah kegiatan yang diikuti dalam rangka koordinasi dan konsultasi (kali)	75	325.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Jumlah Jenis pendukung Pelaksanaan Administrasi (jenis)	3	271.113.040	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran		Jumlah Jenis pendukung Pelaksanaan Administrasi (jenis)	3	271.113.040	
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	650.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas /Operasional (unit)	2 Kendaraan Roda 4, 2 Kendaraan Roda 2	650.000.000	
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	3	15.000.000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Unit)	3	15.000.000	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15	150.000.000	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		Jumlah pengadaan Peralatan Gedung Kantor	15	150.000.000	
	Pengadaan Mebeleur		Jumlah Pengadan Mebeleur (unit)	20	150.000.000	Pengadaan Mebeleur		Jumlah Pengadan Mebeleur (unit)	20	150.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor diperbaiki (unit)	1	100.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah Gedung Kantor diperbaiki (unit)	1	100.000.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin (unit)	17	127.897.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara secara rutin (unit)	17	127.897.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang	40	47.355.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	40	47.355.000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			dipelihara secara rutin (unit)								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	77	47.355.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin (unit)	77	47.355.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur yang dipelihara secara rutin (unit)	20	20.000.000	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur		Jumlah Mebeleur yang dipelihara secara rutin (unit)	20	20.000.000	
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>		<b>Cakupan Realisasi Pengadaan Kebutuhan Penunjang Disiplin aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (pasang)	73	75.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya (pasang)	73	75.000.000	
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>		<b>Presentase Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur (persen)</b>	<b>100</b>		
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal (orang)	2	44.250.000	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat Formal (orang)	2	44.250.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Kecamatan pelaksanaan Sosialisasi (Kecamatan)	6	62.242.400	Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Kecamatan pelaksanaan Sosialisasi (Kecamatan)	6	62.242.400	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis (orang)	12	75.000.000	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan		Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimbingan Tekhnis (orang)	12	75.000.000	
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>		<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja &amp; Keuangan</b>		<b>Cakupan Realisasi Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (persen)</b>	<b>100</b>		
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	4	10.362.000	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	4	10.362.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	1	15.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	1	15.000.000	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	2	15.000.000	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah Dokumen yang telah disusun (dok)	2	15.000.000	
	<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>		<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (persen)</b>	<b>100</b>		<b>Program Penunjang Pemerintahan Umum</b>		<b>Cakupan Realisasi Kegiatan Penunjang Pemerintahan Umum (persen)</b>	<b>100</b>		
	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (dok)	6	36.102.000	Penyusunan Rencana Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun (dok)	6	36.102.000	
	Pengelolaan Website Perangkat Daerah		Jumlah Website yang dikembangkan oleh DPMPSTSP (paket)	1	29.419.500	Pengelolaan Website Perangkat Daerah		Jumlah Website yang dikembangkan oleh DPMPSTSP (paket)	1	29.419.500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)</b>	<b>60</b>		<b>Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi</b>		<b>Jumlah Investor Penanaman Modal (Investor)</b>	<b>60</b>		
	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	2	29.905.700	Peningkatan Koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		Jumlah Dokumen kerjasama yang diterbitkan (dokumen)	2	29.905.700	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	50	22.500.500	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		Jumlah Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan PM (Kegiatan)	50	22.500.500	
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	100	36.751.000	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		Jumlah peserta yang mengikuti Workshop (Orang)	100	36.751.000	
	Penyelenggaraan pameran investasi		Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	4	280.667.420	Penyelenggaraan pameran investasi		Jumlah Kegiatan Pameran yang diikuti (kegiatan)	4	280.667.420	
	<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>		<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)</b>	<b>175</b>		<b>Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi</b>		<b>Jumlah Nilai Realisasi Investasi (Milyar)</b>	<b>175</b>		
	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evauasi Implementasi	1	16.620.450	Perencanaan dan penyusunan kebijakan Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Regulasi Pemberian Insentif PM dan Hasil Evauasi Implementasi Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)	1	16.620.450	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Regulasi Pemberian Insentif (Dokumen)								
	Peningkatan pelayanan Investasi		Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	1	18.320.170	Peningkatan pelayanan Investasi		Jumlah Dokumen SOP layanan Investasi (Dokumen)	1	18.320.170	
	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	4	25.000.000	Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal		Jumlah Dokumen Data Potensi yang dilaporkan dalam sistem informasi Penanaman Modal (Dokumen)	4	25.000.000	
	<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>		<b>Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)</b>	<b>75</b>		<b>Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah</b>		<b>Presentase ketersediaan Dokumen Database Iklim Investasi (persen)</b>	<b>75</b>		
	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi		Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM (dokumen)	1	31.442.290	Kajian potensi sumber daya yang terkait dengan investasi		Jumlah Dokumen Hasil Kajian dan valuasi RUPM (dokumen)	1	31.442.290	
	Penyusunan Data Peluang Investasi		Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	1	15.829.000	Penyusunan Data Peluang Investasi		Jumlah Dokumen Data Peluang Investasi (Buku)	1	15.829.000	
	<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		<b>Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur</b>	<b>75</b>		<b>Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik</b>		<b>Presentase Jumlah Dokumen Perizinan dan non Perizinan yang diterbitkan sesuai sistem dan prosedur</b>	<b>75</b>		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan		Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	1600	115.993.900	Peninjauan Lokasi Layanan Perizinan		Jumlah Izin yang telah dikaji, diteliti dan ditinjau (izin)	1600	115.993.900	
	Pelayanan administrasi perizinan		Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)	7200	113.476.750	Pelayanan administrasi perizinan		Jumlah izin non retribusi yang diterbitkan (izin)	7200	113.476.750	
	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)	1	5.197.390	Penyusunan standar Operasional Prosedur (SOP) bidang pelayanan Perizinan		Jumlah Dokumen Standar Pelayanan yang disusun (Dok)	1	5.197.390	
	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan		Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)	7200	436.437.980	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan penyelenggaraan perizinan		Jumlah izin terbit yang diarsipkan (izin)	7200	436.437.980	
	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan		Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dok)	2	96.305.000	Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan		Jumlah Dokumen Perubahan Regulasi Perizinan (Dok)	2	96.305.000	
	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan		Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dok)	1	43.553.510	Layanan Pengarsipan dan Penerbitan Perizinan		Jumlah dokumen hasil Monev penyeleggaraan perizinan (dok)	1	43.553.510	
	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)	4	103.939.880	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Perizinan (Dok)	4	103.939.880	
	Penanganan Pengaduan Pelayanan		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)	1	15.714.710	Penanganan Pengaduan Pelayanan		Jumlah Dokumen hasil Survey Kepuasan Masyarakat (Dok)	1	15.714.710	



No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan		Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)	1	96.305.000	Penyusunan dan Pengembangan Regulasi Perizinan		Jumlah laporan data layanan informasi perizinan dan kasus penanganan pengaduan (laporan)	1	96.305.000	

## **2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

---

### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif yang dimaksud adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah dan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Penanaman Modal, pengendalian penanaman modal adalah kegiatan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu dalam rangka mendukung prioritas nasional ketiga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif maka diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan penanaman modal. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, selanjutnya dalam Dokumen Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsb, termasuk pendidikan,

pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

**3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki tujuan :

- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Meningkatkan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Bone

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP
- Presentase Peningkatan Investasi

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yaitu :

- Meningkatkannya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Meningkatnya Daya tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone.

Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Nilai PMA/PMDN

**Tabel 3.1.1**

**Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
I	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP
II		Meningkatnya Kualitas Pelayanan DPMPSTP	Indeks Kepuasan Masyarakat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1	2	3	4
III	Meningkatkan Nilai Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone		Presentase Peningkatan Investasi
IV		Meningkatnya Daya Tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone	Nilai PMA/PMDN

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih menitikberatkan pada hal peningkatan promosi dan pengembangan potensi dan produk unggulan daerah melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, serta Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program Utama

- 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
- 2. Program Promosi Penanaman Modal
- 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
- 4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Penunjang

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Pelayanan Penanaman Modal

**Tabel 3.1.2**  
**Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

NO	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
I	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota
II	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
			Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
III	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
IV	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

**Tabel 3.1.3**  
**Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Penunjang Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

NO	PROGRAM PENUNJANG	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Jumlah Rekening Telepon/WiFi dan TV Kabel	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
II	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
			Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan



## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

---

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tahun 2023 merencanakan 6 (enam) Program serta 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

#### **a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### **b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;**

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

#### **c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
- Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan

#### **d. Administrasi Umum Perangkat Daerah;**

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
- Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- Peneyediaan Bahan Logistik Kantor;
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;

#### **e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

#### **f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

#### **g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**

### **a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;**

- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal

### **b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;**

- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

## **h. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL :**

### **a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten / Kota**

- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota

## **i. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL :**

### **a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

## **j. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**

### **a. Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota**

- Pengolahan, penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik;

## **k. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**

### **a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**

- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan

Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel T-C.33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.18.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Presentase Rata rata Capaian Kinerja Indikator Program Tekhnis Daerah</b>	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	5.534.287.200	APBD Kabupaten		<b>100%</b>	<b>6.060.787.270</b>
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	1.917.250	APBD Kabupaten		100%	2.108.975
2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2	1.917.250	APBD Kabupaten		2	2.108.975
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat waktu (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	3.920.389.000	APBD Kabupaten		100	4.312.427.900
2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	34	3.920.389.000	APBD Kabupaten		12 Bulan	4.312.427.900
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Realisasi Pelaksanaan Sub Kegiatan Administrasi Kepegawaian Daerah	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	37.225.000	APBD Kabupaten		100	40.947.500

*Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024*

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	10	14.000.000	APBD Kabupaten		34	15.400.000
2.18.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	22.125.000	APBD Kabupaten		1	24.337.500
2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	1.100.000	APBD Kabupaten		15	1.210.000
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Umum Kantor (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	696.688.560	APBD Kabupaten		100	764.357.416
2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kanror yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12	68.774.400	APBD Kabupaten		36	75.651.840
2.18.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4	5.034.680	APBD Kabupaten		1	5.538.148
2.18.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	2	233.749.480	APBD Kabupaten		1	257.124.428

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12	27.965.000	APBD Kabupaten		2	30.761.500
2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	13	39.840.000	APBD Kabupaten		192	43.824.000
2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Tanete Riattang Barat	176	301.325.000	APBD Kabupaten		176	331.457.500
2.18.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	20.000.000	APBD Kabupaten		1	20.000.000
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	54.417.290	APBD Kabupaten		100	59.859.019
2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	8.692.000	APBD Kabupaten		25	9.561.200
2.18.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	5	45.725.290	APBD Kabupaten		35	50.297.819

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	648.043.200	APBD Kabupaten		100	698.363.520
2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12	144.840.000	APBD Kabupaten		36	144.840.000
2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	3	503.203.200	APBD Kabupaten		735	553.523.520
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam Kondisi Baik (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	175.606.900	APBD Kabupaten		100	182.722.940
2.18.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasioanl Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	11	87.487.900	APBD Kabupaten		27	96.236.690
2.18.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kecamatan Tanete Riattang Barat	12	33.540.000	APBD Kabupaten		87	36.894.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	54.579.000	APBD Kabupaten			49.592.250
2:18:04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Presentase Ketepatan waktu penerbitan izin sesuai SOP (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	90	598.215.000	APBD Kabupaten		90	658.036.500
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	8000	598.215.000	APBD Kabupaten		8000	658.036.500
2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1900	299.433.000	APBD Kabupaten		1900	329.376.300
2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha dan Pelaku Usaha yang mendapat pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	213.862.000	APBD Kabupaten		1	235.248.200



KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.04.2.01.03	Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan	Jumlah Orang yang memperoleh layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	84.920.000	APBD Kabupaten		4	93.412.000
2:18:02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Presentase Capaian Nilai Realisasi Investasi Penanaman Modal (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	21	36.745.000	APBD Kabupaten		18	40.419.500
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Investor yang mendapatkan pemberian fasilitas/Insentif yang menjadi kewenangan (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	17.262.500	APBD Kabupaten		100%	18.988.750
2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah / Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	17.262.500	APBD Kabupaten		1	18.988.750
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Presentase wilayah Kabupaten Bone yang telah disusun kedalam peta potensi investasi (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	100	19.482.500	APBD Kabupaten		100	21.430.750

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	13.607.500	APBD Kabupaten		1	14.968.250
2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang usaha Kabupaten / Kota	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	5.875.000	APBD Kabupaten		1	6.462.500
2:18:03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Presentase Peningkatan Jumlah Investor Penanaman Modal (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	15	312.539.000	APBD Kabupaten		20	343.792.900
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Investor Penanaman Modal (investor)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	150	312.539.000	APBD Kabupaten		200	343.792.900
2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Kota	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	26.139.000	APBD Kabupaten		3	28.752.900
2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Kecamatan Tanete Riattang Barat	4	286.400.000	APBD Kabupaten		4	315.040.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2:18:05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase Perusahaan yang taat terhadap ketentuan penanaman modal (persen)</b>	Kecamatan Tanete Riattang Barat	50	355.456.300	APBD Kabupaten		65%	391.001.930
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Realisasi Penanaman Modal (persen)	Kecamatan Tanete Riattang Barat	75	355.456.300	APBD Kabupaten		85	391.001.930
2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	70	59.905.000	APBD Kabupaten		1	65.895.500
2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang mendapatkan Pembinaan pelaksanaan Penanaman Modal	Kecamatan Tanete Riattang Barat	50	220.017.300	APBD Kabupaten		2	242.019.030
2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan usaha yang melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	20	75.534.000	APBD Kabupaten		1	83.087.400
2:18:06	<b>PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>	<b>Presentase ketersediaan Data dan Informasi perizinan dan Non Perizinan (persen)</b>	Kecamatan Tanete Riattang Barat	85	18.150.000	APBD Kabupaten		90	19.965.000

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi Lembaga lainnya yang terintegrasi dengan sistem informasi perizinan berusaha	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	18.150.000	APBD Kabupaten		1	19.965.000
2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Sistem Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan perizinan berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dioah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kecamatan Tanete Riattang Barat	1	18.150.000	APBD Kabupaten		1	19.965.000
					6.855.392.500	-	-	-	7.514.003.100

Adanya sub kegiatan yang tersedia dalam dokumen RENSTRA namun tidak teranggarkan dalam dokumen RENJA disebabkan kondisi anggaran yang tidak memungkinkan dan indikator output sub kegiatan tersebut merupakan indikator penunjang serta tidak mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Perubahan Tahun 2024, secara sinergitas dan terintegrasi. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.
2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Perubahan Tahun 2024, Renja Perubahan Tahun 2024 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2024.
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Koordinator dan Sekretariat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Dinas.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, setiap Koordinator dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
6. Renja Perubahan Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-

prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator penyusunan dokumen regulasi pemberian insentif / kemudahan kepada penanam modal dan kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal merupakan dua kegiatan prioritas pada Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal Tahun 2024, dalam kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien transparan dan akuntabel.